

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gaffar. J. M., Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum (Malang: Penerbit UMM Press, 2009).
- Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987).
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik (Depok: Penerbit Rajawali Press, 2018).
- Tjenreng, M. B. Z., Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak. (Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020).

B. Jurnal/Artikel

- Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, (Desember 2014).
- Arief Rachman Hakim & Yulita Dwi Pratiwi. "Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Jurnal Konstitusi 19.4 (2022).
- Benny, Dian Leonaro, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun G.P "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022)
- Cairin Melina, "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2.2 (2018): 189-198.

- Diana Yussyanti. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4.1 (2015): 85-104.
- Dio Siaga Putra Pulungan dan Ansorullah Ansorullah, "Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang Undangan Di Bawah Undang-Undang," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022)
- Jimly Asshidiqqie, "Setahun Mahkamah Konstitusi : Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan , serta Setangkup Harapan, Dalam Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi: Menjaga Denyut Konstitusi", (Jakarta:Konpress,2004).
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010).
- Lilik Mulyadi, "Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan", Bandung: Citra Aditya Bakti, (2009).
- Mahrus Ali. "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif." *Jurnal Konstitusi* 7.1 (2010): 067-090
- M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 353, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Retno Saraswati, "Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada". *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), (2011), 196-201.
- Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya". *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 4, Mei 2016, pp. 795-24.
- Virto Silaban. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021): 60-76.
- Warjiyati, S. "Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 4, no. 1, (April 2024): 114

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 821 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 822 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024

Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1156 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1166 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1171 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1175 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024

Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 1182 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1202 Tahun 2024 tentang Penunjukan Moderator dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1969 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024

D. Internet

Tim Hukum Online, “Demokrasi: Sejarah dan Pelaksanaanya di Indonesia”, 5 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-1t61b739dbb5bf8/>, diakses pada tanggal 24 November 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian KPU Kabupaten Semarang

Surat Pengantar dari Kampus

RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

18110
www.fh.unp.ac.id

Nomor : 1005/UN7.F1/AK/XI/2024
Tempat :
Tanggal : 25 NOV 2024
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
Jl. Ahmad Yani No.6, Ungaran
Kabupaten Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan membantu pelaksanaan penelitian dengan memberikan izin kepada mahasiswa berikut

Nama : Artanti Widawati
NIM : 11000121130384
Alamat : Jalan Durian Selatan II A No.8
Nomor HP : 085225249986
Bidang minat : Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXII/2024 Terhadap Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H.
NIP. 196711191993032002

Surat Jawaban dari KPU Kabupaten Semarang

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**
Jl. Jend. A. Yani No. 6 Ungaran
Kabupaten Semarang
Telp. (024) 6922540 Email: kpukabsem@gmail.com

Ungaran, 28 November 2024

Nomor : 1272/HM.03.4-SD/3322/4/2024
Lampiran : -
Hal : Surat Jawaban Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
di-

SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 1005/UN7.F1/AK/XI/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Permohonan Riset/ Penelitian dalam rangka menyusun Skripsi mahasiswa atas nama Artanti Widawati dengan judul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024", berikut kami sampaikan beberapa hal :

1. Tidak keberatan dan mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin penelitian diberikan untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan di hari kerja.

Demikian untuk dijadikan maklum dan atas perhatian kami ucapkan terimakasih.


Dedy Orban

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Semarang, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Semarang dan Sekretaris KPU Kabupaten Semarang.

